

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2018
TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

(Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)

Skripsi

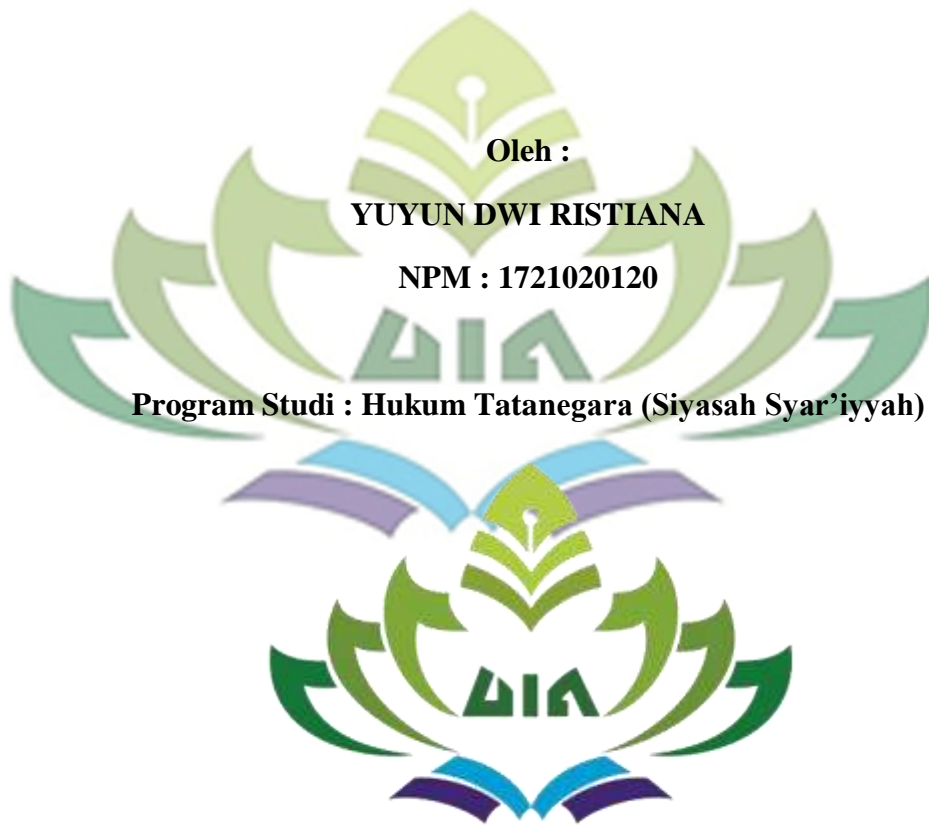
**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

YUYUN DWI RISTIANA

NPM : 1721020120

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2018
TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
(Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)**

Skripsi:

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien di RSUD Pringsewu yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Namun dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit tersebut sering menimbulkan keluhan-keluhan dari Ketidakpuasan pasien khususnya berasal dari kurangnya kualitas pelayanan terhadap pasien di dalam perawatan, dan prosedur pelayanannya kurang, seperti Perawat dan tenaga penunjang medis serta non-medis yang bertugas di rumah sakit seharusnya lebih memahami cara memberi pelayanan konsumennya dengan baik terutama kepada pasien dan keluarga, serta lambatnya petugas dalam menangani keluhan dari masyarakat.

Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 di RSUD pringsewu, kemudian Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan praktek pelayanan kesehatan di RSUD Pringsewu belum terlaksana dengan cukup baik dilihat dari sarana, prasarana maupun fasilitas yang ada. Dalam hal ini dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien bahwasanya pelayanan yang ada di RSUD Pringsewu dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan yang ada belum berjalan sesuai QS. Annisa:59 karena Islam kerap mengajarkan kita untuk mentaati perintah ulil Amri.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Dwi Ristiana
NPM : 1721020120
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 05 Juli 2021
Penulis,



Yuyun Dwi Ristiana
NPM. 1721020120



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama : Yuyun Dwi Ristiana

NPM : 1721020120

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah, Nur, M.H.
NIP.1969081993032002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si
NIP. 98003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)"** Disusun oleh Yuyun Dwi Ristiana, NPM 172102012, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) telah diajukan dalam munaqasah Fakultas Syari'ah pada hari tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki M.Si

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji I : Dr. Susiadi As. M. Sos.I

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji III : Uswatun Hasanah M.Pd.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. QS. Asy-Syu'ara' Ayat 183.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan ini kepada :

1. Ibu Rasiyem dan ayah Suparniyanto tercinta telah ikhlas dan sabar membesarkan, mendidik serta selalu mendo'akan.
2. Kepada kakakku yang selalu menyemangatkanku Dedi Safe'i, Uswatun Hasanah yang selalu membantu dan mendoakan untuk kelulusanku.
3. Sahabat- Sahabatku Siti Nafsiah, Niken Febriana Saputri, Nisaul Hasanah dan teman-teman angkatan 2017 Siyasah C yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan kepadaku.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Yuyun Dwi Ristiana, Seorang anak yang dilahirkan di Desa Karang Sambung Kabupaten Pringsewu, Tepatnya pada Tanggal 9 April 1999 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Suparniyanto dan ibu Rasiyem.

Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) N 2 Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu lulus pada tahun 2011. Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) di SMPN 5 Pringsewu, lulus pada tahun 2014. Sekolah lanjut (SLTA) SMAN 1 Pagelaran, lulus pada tahun 2017. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)”.

Sholawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusun skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dosen pembimbing I dan Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbinganya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

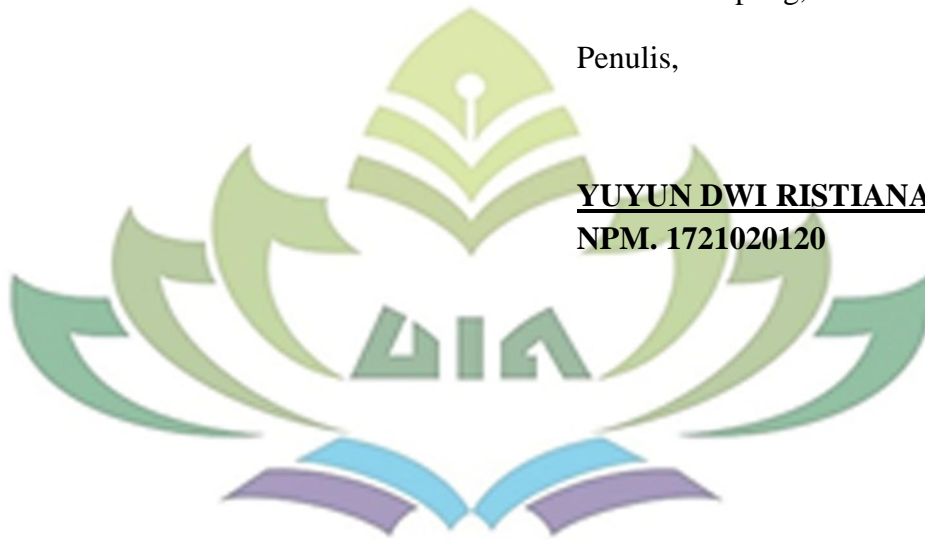
Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, 05 Juli 2021

Penulis,

YUYUN DWI RISTIANA
NPM. 1721020120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	20
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	25
2. Kesehatan Dalam Islam	31
3. Pelayanan Kesehatan Dalam Islam	36
B. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	43
C. Pengertian Rumah Sakit	49
1. Rumah Sakit Dalam Islam	54
2. Hak Dan Kewajiban Pasien Di Rumah Sakit	56
3. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien	48
4. Tanggung Jawab Rumah Sakit Kepada Pasien	59
5. Etika Pengobatan	59
 BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu	65

B. Struktur Organisasi Dan Ketenagaan Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu	72
C. Praktek Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu	76
1. Waktu-waktu kapan saja	76
2. Bentuk dan mutu pelayanan menurut dokter dan petugas	76
3. Bentuk dan mutu pelayanan menurut Pasien.....	81
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Praktek Pelayanan Kesehatan	85

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu	86
B. Pandangan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018	88

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel.

1.1 Jenis Pelayanan dan Fasilitas Penunjang.....	69
1.2 Pelayanan medik lain dan penunjang	69
1.3 Rawat Inap	70
1.4 Sarana penunjang.....	74
2.1 Data kepegawaian di RSUD Pringsewu	75
2.2. Data SDM RSUD Pringsewu Berdasarkan Pendidikan.....	76
2.3 Data SDM RSUD Pringsewu Berdasarkan Spesialisasi Tenaga.....	77
2.4 Data SDM RSUD Pringsewu Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)”** adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. **Fiqh Siyasah** yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. **Peraturan** yaitu, ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan dan tatanan.³
4. **Menteri Kesehatan** yaitu, menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan.
5. **Rumah Sakit** yaitu, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h.13.

³*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1200.

6. **Pasien** yaitu, setiap orang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.⁴

Penulisan skripsi ini yang terkait dalam masalah yaitu pasal 2 dan 26. Dan berdasarkan istilah tersebut dapat dirumuskan maksud dari judul keseluruhan yaitu **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Study di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)”** adalah sesuai atau tidaknya peraturan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

B. Latar Belakang Masalah

Di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan, yaitu : ”Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 tahun 2018 Pasal 2 dan 26 point b.

kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri negara hukum formal menurut Friederich J Stahl sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud MD., adalah:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan HAM. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai HAM diantaranya : Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materiil, sebab pada umumnya aparat penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundangundangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Di lain pihak, hukum dan proses hukum formal terdapat fakta bahwa untuk menggapai keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salahsatu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepantasnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya

perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.⁵

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Masing-masing pihak memiliki kewajiban, kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional secara berkelanjutan dengan meningkatkan program kerja yang bagus serta fasilitas yang aman dan optimal.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan bahwa pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁶ Kemudian seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 dalam Pasal 2 (1) setiap rumah sakit memiliki kewajiban:

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

⁵Efa Rodiah Nur, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*, ejournal.undip.ac.id, Jilid 45 No. 2, April 2016.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 3.

3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. Melakukan fungsi sosial;
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. Menyelenggarakan rekam medis;
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
10. Melaksanakan sistem rujukan;
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.⁷

Pengertian dari *fiqh siyasah* ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ *Fiqh siyasah* dibagi 3 macam yaitu :

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Pasal 2 (1) .

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2017), h.40.

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁹
- b. *Fiqh Siyasah Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.¹⁰
- c. *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.¹¹

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.¹² Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alqur'an, hadist Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat memenuhi kebutuhannya.¹³

Penulisan skripsi ini yang menjadi acuan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yaitu suatu peraturan yang menjadi acuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

⁹*Ibid.* h. 41.

¹⁰*Ibid.* h. 43.

¹¹*Ibid.* h. 45.

¹²*Ibid.* h. 41

¹³*Ibid.* h. 42.

Pada masa perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak perusahaan yang baru berdiri diberbagai bidang dan persaingan antar perusahaan dalam mencapai tujuannya juga semakin ketat. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa, memberikan pelayanan yang terbaik dan mengadakan fasilitas merupakan hal yang paling penting karena akan mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan mendapatkan kepuasan konsumen yang telah menggunakan jasa dari perusahaan tersebut.¹⁴

Hasil pengamatan awal dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak pasien kekurangan pelayanan kesehatan yang aman dan kurangnya fasilitas rumah sakit. Dalam peraturan menteri kesehatan telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 point b yaitu memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.¹⁵

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia.¹⁶ Diantara cara islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Berikut adalah konsep menjaga kesehatan menurut islam yaitu :

1. Menjaga *Thoharoh*, artinya menjaga kesucian dan kebersihan dari semua aspek mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun lingkungan

¹⁴Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*,(Jakarta;Binarupa Aksara, 2011), h.31.

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 1 (b).

¹⁶Abudin, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*(Jakarta:BinarupaAksara, 2004.), h. 52.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۖ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur" (Q.S Al-Maidah : 6).¹⁷

2. Menjaga makanan, ajaran islam selalu menekankan agar setiap orang memakan-makanan yang baik dan halal itu baik secara dzatnya maupun secara mendapatkannya.¹⁸

Selanjutnya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, dibutuhkan pelayanan kesehatan yang baik serta mencukupi bagi setiap warga negara.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang dikutip dari buku Y.A Triana

¹⁷Al Maidah ; 6 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Haalim Publishing dan Distributing, 2014), h. 108.

¹⁸*Ibid.* h. 40.

Ohoiwutun, Hukum kesehatan adalah sekelompok peraturan hukum yang mengatur tentang pelayanan kesehatan.¹⁹

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien serta pelayanannya di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Maka penulis hanya memfokuskan penelitian dengan konsep Fiqh Siyasah untuk menghindari kekeliruan judul skripsi.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur tinggi rendahnya fasilitas, sarana dan prasarana pelaksanaan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.
2. Untuk Mengetahui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu menurut pandangan *Fiqh Siyasah*.

¹⁹ Y.A Triana Ohoiwatun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Banyu Media, Malang.2007, h. 3,2.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memastikan apakah Peraturan Menteri yang dibuat oleh Negara tersebut sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan.
2. Untuk mengetahui lebih dalam menurut pandangan *Fiqh Siyasah* dan peraturan menteri kesehatan republik indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang telah penulis temukan. Adapun karya ilmiah yang dipilih penulis yaitu:

Skripsi Istiqomah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit Siti Kodijah Sepanjang. Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas mengenai perjanjian hukum dalam hal pelayanan antara pasien dan pihak rumah sakit di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang.

Skripsi Elis Nur Aini yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Pasien Rawat Inap) di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo”. Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Siti Hajar dalam memberikan pelayanan medis dan memberikan kepuasan pelanggan atau pasien.

Sedangkan buku yang dijadikan acuan bagi penulis adalah buku tentang Farmasi Rumah sakit, dalam buku ini mengulas secara rinci mengenai hak dan kewajiban rumah sakit.

Buku karya Reni Ibrahim yang berjudul “Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam”. Dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci tentang penerapan pelayanan kesehatan dalam islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian melingkupi jenis dan sifat penelitian.²⁰

Adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan penyertaan contohnya.²¹

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yangn berkaitan dengan latar belakang dan

²⁰Susdiadi, *Metode Peneliti (Lampung:Pusat Peneliti dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015)*, h.18.

²¹*Ibid.* h. 19.

kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu, proses atau cara ilmiah untuk mendapat data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian²³. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta dilapangan. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan objek dan pokok permasalahan yang akan diteliti yang akan diteliti yang memerlukan suatu pengamatan dan pemahaman yang cermat dan seksama terhadap objek peneliti.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana penelitian akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder.²⁶

a. Sumber data primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.²⁷ Untuk mendapatkan data

²²*Ibid.* h. 20.

²³*Ibid.* h. 22.

²⁴*Ibid.* h. 21.

²⁵Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.50.

²⁶*Ibid.* h. 55.

²⁷*Ibid.* h. 57.

primer dalam hal ini data yang diperoleh adalah data langsung dari responden (pasien yang berobat).

- b. Sumber Sekunder yaitu data pendukung, dan data tersebut diperoleh literatur-literatur dan dokumen dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapat deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan social atau salah satu aspeknya.²⁹

Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.³⁰

Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.³¹

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh informan.

²⁸*Ibid.* h . 60.

²⁹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2018), h. 22.

³⁰Basri Ms, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta:Restu Agung,2006), H. 58

³¹Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997,h.54

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang teliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku yang ada.³³

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.³⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.101.

³³Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Penerbit Teras, 2009), h. 57-66.

³⁴Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.147

petugas, 2 dokter, dan 10 pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁵

Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sample yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sample pada penelitian ini adalah petugas, dokter dan pasien yang menerima layanan.

Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil dari 2 petugas, 2 Dokter, dan 10 orang Pasien.

6. Teknik Pengolahan Data

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan kenyataan.³⁶ Sedangkan pengolahan data adalah serangkaian operasi yang rencanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang di inginkan.

Teknik pengolahan data dibagi menjadi dua yaitu :

³⁵Suharmisi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.102.

³⁶Abdulkadir, *Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum*, (bandung:PT Citra Aditya Bakti , 2004),h. 26.

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, relevan dan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.³⁷
- b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁸

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (Dugaan Sementara) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.³⁹ Dalam penelitian ini metode berfikir digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.⁴¹

Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang

³⁷Ibid. 27.

³⁸Ibid. h. 28.

³⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

⁴⁰Ibid. h. 7.

⁴¹Ibid. h. 10.

telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, dan terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.⁴²

Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halama judul, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan.

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4

⁴² Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2004) h. 127.

Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Dalam bab ini terdiri Tiga sub bab yakni pertama pengertian Fiqh Siyasah, ruang lingkup Fiqh Siyasah, kesehatan dalam Islam, pelayanan kesehatan dalam islam, kedua peraturan menteri kesehatan No. 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, ketiga pengertian rumah sakit.

Bab III dalam penelitian ini berisi hasil penelitian yakni gambaran lokasi penelitian skripsi mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Bab IV tentang Analisis Data. Bab ini merupakan pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yakni pelaksanaan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yakni bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh merupakan contoh *taqrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Tashri'fan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terinci.⁴³ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, untuk mencakup sesuatu.⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma'luf *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.

Berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, Dalam Fiqh Siyasah ini, ulama mujtahid menggali

⁴³Wabah al-zuhayli. , *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr), 2010, h. 18.

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, h. 3.

sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁵

Secara garis besar sumber *fiqh siyasah* dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Fathiyah al-Nabawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, '*Urf* atau kebiasaan masyarakat bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁶

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁷

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga dengan lembaga negara, baik hubungan

⁴⁵Ibid, h. 4.

⁴⁶Ibid, h. 16.

⁴⁷H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 30

bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan⁴⁸. Seperti pernyataan dari Abdul Wahab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.⁴⁹

Suyuti pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁰

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵¹ Secara umum, metode yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* yaitu:

⁴⁸Ibid. h. 33.

⁴⁹Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 45.

⁵⁰Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 48.

⁵¹H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

1. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dan diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁵²

2. *Al-mashalahah al-mursalah*.

Al-mashalahah al-mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu penerapan *al-mashalahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istqra'*. Jika tanpa penelitian tersebut, penggunaan *al-mashalahah al-mursalah* tidak menimbulkan kemashlahatan, melainkan sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁵³

3. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Penggunaan dalam *fiqh siyasah* *sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-*

⁵²Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

⁵³*Ibid.*

Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.⁵⁴

4. *Al-'Adah*

Al-'Adah merupakan metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah*. *Adah* terbagi dua macam, yaitu: *al-'adah ash shohihah* dan *al-'addah al-fasidah*. *al-'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*. Sedangkan *al-'addah al-fasidah* adat yang bertentangan dengan *Syara'*.⁵⁵

5. *Al-Istihsan*

Al-Istihsan sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Menurut 'Ibn 'Arabiy: "melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil. Jadi maksud yang dijelaskan oleh 'Ibn 'Arabiy bahwa dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat."⁵⁶

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* digunakan sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyasah*. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu.⁵⁷

⁵⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 51.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

1. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Pembagian *fiqh siyasah* disederhanakan menjadi 3 bagian pokok yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (politik perundang-undangan)

Siyasah Dusturiyyah merupakan pengkajian tentang penetapan hukum (*siyasah dusturiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁵⁸ *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* merupakan keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁵⁹

2. *Siyasah dauliyyah/Siyasah Khrijiyyah* (politik luar negeri)

Siyasah dauliyyah/Siyasah Khrijiyyah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan non-Muslim (*al-siyasah al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*). Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain.⁶⁰ *Siyasah dauliyyah* merupakan pengaturan masalah kenegaraan bersfat luar negeri, serta kedaulatan neagara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.⁶¹

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, h. 15.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Pratama), 2017, h. 41.

⁶⁰ *Ibid.* h. 15.

⁶¹ *Ibid.* h. 45.

3. *Siyasah Ma'liyyah* (politik keuangan dan moneter)

Siyasah Ma'liyyah membahas terkait sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁶²

Siyasah Ma'liyyah merupakan hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.⁶³

Pada penelitian ini kajian yang digunakan adalah *Siyasah Dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat ini. *Fiqh siyasah dusturiyah* membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dan prinsip-prinsip beragama yang merupakan realisasi dalam kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks, secara umum meliputi:

1. Persoalan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul ali wal aqli*

⁶²*Ibid.* h. 16.

⁶³*Ibid.* h. 43.

8. Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.⁶⁴

Keseluruhan persoalan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua pokok:

- a. Dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist Mudasidu syariah, dan mandat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat karena dalil-dalil kully menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil ijhad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁵

Kepemimpinan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam menghadapi masyarakat sebagai bawahan atau kaulanya. Jelas disini ada unsur-unsur pemimpin itu berobyekan masyarakat, sedangkan pemimpin itu seharusnya orang yang mempunyai sifat-sifat kongkrit serta khusus.

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah:

- a. Kepercayaan, percaya akan kebenaran, dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan terlebih dahulu.
- b. Cakap, suatu faktor yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam hal kecerdasan dalam hal berfikir secara kritis.
- c. Berani, berani mengambil keputusan serta penuh rasa tanggung jawabnya.
- d. Ulet, kegagalan dalam suatu usaha tidak boleh putus asa, akan tetapi mereka harus tabah serta intropeksi atas mawas diri.

⁶⁴Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta Kalam Mulia, 2003) cet 1. H. 276.

⁶⁵Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta Kencana, 2003), H-47-48.

Pemimpin dianggap sebagai figure primus inter pares dalam sebuah masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungan. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. Pemimpin dimasa depan juga bakal dihadapkan kepada sejumlah tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti manager, melainkan seorang yang memang pemimpin.

Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah ialah rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik. Namun menurut para ahli mendefinisikan rakyat biasanya berhubungan dengan kepentingan public yang secara otomatis berbeda dengan kepentingan pribadi.

Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam, diantaranya:

- a. Amanah
- b. Asas persamaan (*mabda al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dan hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fa'liyyah*). Artinya persamaan yang

diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan factual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan factual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: *bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya*.

c. Asas tanggung Jawab Publik

Pengertian tanggung jawab publik adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab publik diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas yang dimintai pertanggung jawaban.”⁶⁶

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh siyasah dusturiyyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁶⁷ Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang ditunjuk oleh hal ihwal

⁶⁶Ija Suntana, *pemikiran ketatanegaraan Islam*, (bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 31.

⁶⁷Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60.

kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.⁶⁸

Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist. Antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah Qs.An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. *An-Nisa* : 58).⁶⁹

Maksud dari ayat diatas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat dibidang apapun dengan tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain didalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak.⁷⁰

Adapun makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada masa modern saat ini, adalah sebagai berikut :

Pertama, pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

⁶⁸ *Ibid* h. 62.

⁶⁹ Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. An-Nisa:58.

⁷⁰ Abdul Salim Munir. *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016), h. 80.

Kedua, As-siyasah adalah ilmu negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dalil-dalil yang lebih terperinci.⁷¹

2. Kesehatan Dalam Islam

a. Pengertian Sehat

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi meliputi seluruh aspek kebutuhan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan ekonomis.

Sehat menurut batasan WHO (*World Health Organization*) adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁷²

Kesehatan dalam ajaran islam selalu menekan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal sebagaimana Firman Allah Swt yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾

⁷¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008). H.2.

⁷²Wahyono Hadi Parnomo, Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. (Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbit Cv Budi Utama): 2017). H. 120

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.s Al-Baqarah[2] : 168).⁷³

Dalam pengertian yang paling luas, sehat merupakan suatu keadaan dinamis, dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-peubahan lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan fisik, sosial dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya.

b. Pentingnya menjaga kesehatan dalam islam

Rosullulah Saw pun bersabda : “Dua anugerah membuat banyak orang merugi, yaitu kesehatan dan kesempatan” (H.r. al-Bukhari).

“Pergunakanlah dengan baik lima hal sebelum lima yang lain: masa mudamu sebelum engkau tua; sehatmu sebelum engkau sakit; kayamu sebelum engkau jatuh miskin; masa senggangmu sebelum engkau sibuk ; hidupmu sebelum engkau mati”. (Hr.al-Hakim).

Ada beberapa riwayat hadist yang mengandung ajaran-ajaran hidup sehat dari sabda Rosullulah, “ Lakukanlah berpergian, maka kalian sehat”. (H.r. Ahmad). “dan berpuasalah kalian, maka kalian sehat. (H.r. ath-Thabarani).”Orang yang tidur dalam keadaan tangannya berbau lemak, lalu ia terkena sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri” (H.r. ad-Darimin)

Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rosulullah SAW menerapkan pola makan yang sehat diantaranya:

“Rosulullah biasa memakan kurma dengan mentimun”. (H.r. al-Bukhari dan Muslum).

⁷³Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan. Q.s Al-Baqarah : 168.*

“Rosulullah melarang tidur setelah makan”. (H.r. Abu Nuaim).

“Rosulullah menganjurkan mengawali berbuka dengan kurma, jika tidak ada maka dengan air” (H.r. at-Tirmidzi).⁷⁴

Pola hidup sehat ada tiga macam yaitu:

1. Melakukan hal-hal berguna untuk kesehatan;
2. Menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan;
3. Melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan penyakit yang diderita.⁷⁵

c. Kesehatan menurut islam

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang menuju kebahagiaan tersebut memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “Mohonlah kepada Allah pengampunan, kesehatan, dan keyakina di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada seseorang setelah keyakinan (iman) yang lebih baik dari pada kesehatan.” (H.r. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Bakar, Sahih sanadnya dari Ibnu Abbas).⁷⁶

Beberapa petunjuk agama yang berhubungan dengan kesehatan:

1. Makan jangan berlebihan.

⁷⁴Wahyono Hadi Parnomo, Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. (Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbit Cv Budi Utama): 2017). H. 121.

⁷⁵Ibid. H. 122.

⁷⁶Ibid. H. 124.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf:31 Allah Swt berfirman:

يَبْنَى ٓءَآدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.s al-A'raf [7]:31).⁷⁷

Dalam ilmu kesehatan, makan dan minum merupakan kebutuhan dalam pemenuhan nutrisi sebagai penunjang hidup, yang jumlah dan macamnya harus sesuai dengan keperluan tubuh, tidak boleh berlebih. Apabila kekurangan atau berlebihan akan mengganggu kesehatan tubuh.

2. Makan makanan yang sehat

Dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5]:88 Allah befirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dengan memenuhi makan yang memenuhi unsur gizi ini lagi baik (thayyib) diharapkan tubuh berada dalam keadaan yang optimal sehingga daya tahan tubuh berada dalam keadaan yang optimal sehingga daya tahan tubuh akan bekerja secara maksimal dalam menolak segala macam penyakit.⁷⁸

⁷⁷Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. al-A'raf : 3.

⁷⁸Ibid. H.125.

3. Nabi Saw menganjurkan agar mendinginkan makanan atau minuman sebelum dimakan atau diminum.

Rosulullah Saw bersabda:

“Dinginkan makanan dan minuman kamu sesungguhnya tidak ada kebaikan pada makanan/minuman yang panas”, (H.r. al-Hakim dan al-Dailami).

Mendinginkannya tidk dengan ditiup dengan nafas karena ini juga dilarang olh Nabi Saw. (H.r. Ibnu Majah).

4. Tidak minum minuman berakohol dan apa saja yang merusak tubuh.

(Qs. Albaqarah [2]:219) Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." (Qs. Albaqarah [2]:219).⁷⁹

5. Olahraga bermanfaat untuk kesehatan

Oleh karena itu, dengan berolahraga yang teratur, terukur, dan bersifat aerobik akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mencegah kegemukan dengan segala dampak negatifnya, menguatkan dan lebih mengefisienkan kerja otot-otot tubuh seperti jantung dan otot lainnya.

⁷⁹Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Albaqarah : 219

“Dan sungguh atas badan kamu hak-hak yang wajib dipenuhi, maka penuhilah haknya.” (H.r. Bukhari).⁸⁰

3. Pelayanan Kesehatan Dalam Islam

Hukum Islam tentang pelayanan kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialguna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis dalam keadaan jasmani, rohani, dan sosial.⁸¹ Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif, perhatian islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.⁸²

Islam bukan hanya yang mengatur tentang ibadah ritual semata. Akan tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, termasuk salah satu di dalamnya adalah bidang kesehatan yang harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi tiga prinsip buku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat: pertama, sederhana dalam peraturan. Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan.⁸³

Pelayanan menurut jenisnya terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan yang ditunjukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Banyak sekali tuntunan dalam agama baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang merujuk kepada ketiga jenis yakni kesehatan jasmani, dan sosial. Upaya untuk memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk:

⁸⁰Ibid. H. 126.

⁸¹Ahsin W. Al-Hafidz. *Fikih Kesehatan*. (Jakarta: Amzah, 2017, H. 4.

⁸²Kelany HD. *Islam Dan Aspek-Aspek kemasyarakatan*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2010). H. 169.

⁸³Reni Ibrahim. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2015). H. 69.

- a. Pelayanan kesehatan promotif yaitu upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya promotif ini tercemin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya, manusia wajib memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya.⁸⁴
- b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu upaya untuk mencegah atau melindungi dari terjadinya penyakit kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota berarti menjerumuskan kehidupannya pada kehancuran. Oleh karena mencegah datangnya penyakit lebih baik dari pada mengobati. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab yang tiada duanya. Oleh karena itu, upaya preventif dapat dimulai dengan meletakkan prinsip.⁸⁵

Qs. Albaqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁸⁶

⁸⁴Ahsin W. Al-Hafidz. *Fikih Kesehatan*. (Jakarta: Amzah, 2017, H. 15.

⁸⁵Ahsin W. Al-Hafidz. *Fikih Kesehatan*. (Jakarta: Amzah, 2017, H. 18.

⁸⁶Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Albaqarah ayat 222

- c. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu penyembuhan penyakit itu Allah, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha menyembuhkan dengan jalan berobat. Allah berfirman:

Qs. Asy-syu'ara ayat 80 :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku.⁸⁷

- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi sehat. Upaya rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.

Allah berfirman: Qs. Ar-rad Ayat 11 :

الْمَرْءُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Artinya:”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.”⁸⁸

Dalam pandangan hukum Islam itu sendiri merawat pasien merupakan tugas mulia, baik secara tersurat maupun tersirat agama Islam sangat

⁸⁷Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Asy-syu'ara ayat 80.

⁸⁸Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Ar-ra'd Ayat 11.

memenuntut akan hadirnya peran perawat antara lain, dalam menjalankan tugas harus memperhatikan ketelitian, kecermatan dan kewaspadaan guna meminimalisir resiko negatif yang mungkin akan timbul. Serta tanggung jawab yang akan tinggi dalam menghadapi segala tindakan yang dilakukan.⁸⁹

Pelayanan harus diberikan kepada setiap pasien yang datang untuk berobat adalah layaknya seorang yang harus dimuliakan dan diwajibkan juga untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan antara sesama umat yang membutuhkan pertolongan.⁹⁰

Adapun Kedokteran Islam Modern Rasulullah tidak melarang pengobatan modern, malahan memberikan pengajuan yang kuat padanya, beberapa hadits lain juga menerangkan bahwa Rasulullah pernah memanggil dokter untuk pengobatan salah satu sahabat Anshar yang mengalami pendarahan internal, bahkan Rasulullah ketika menjelang wafatnya, beberapa dokter baik Arab maupun non Arab selalu datang serta duduk disamping beliau dan mengobati beliau.⁹¹ Penyederhanaan kedokteran Islam menjadi kedokteran nabi sesungguhnya juga tidak terjadi pada masa-masa kejayaan Islam. Pada saat itu kaum muslimin secara sadar melakukan penelitian-penelitian ilmiah di bidang kedokteran secara *orisinal* dan memberikan kontribusi yang luar biasa dibidang kedokteran. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka, seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu-Sina, Ibnu-Rushd, Ibn-Al-Nafis, dan Ibn-Maimon.

⁸⁹Reni Ibrahim. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2015). H.85

⁹⁰Reni Ibrahim. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2015). H. 87.

⁹¹As-Suyut, Abdurahman Jallaludin. *Pengobatan cara nabi*. 2006. Pustaka Hidayah. Bandung.

Selain itu mengenai kesehatan umum, peradaban Islam juga telah mengenal ilmu kedokteran. Sejak Zaman Rasulullah SAW. Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang dipelajari dengan seksama. Haris bin kaladah adalah seorang dokter zaman Nabi SAW. Walaupun dia bukan seorang muslim yang sakit untuk berobat kepadanya.⁹²

Adapun beberapa tokoh muslim dalam ilmu kesehatan sebagai berikut:

1. Hunain Ibnu Ishaq

Beliau dilahirkan pada tahun 809 meninggal pada tahun 874. Beliau ialah spesialis mata. Hasil karyanya ialah buku-buku menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa yunani ke dalam bahasa arab.

2. Abu Mawar Ibnu Malik Ibnu Abil'ala Ibn Zuhur

Beliau lahir pada tahun 1091 M dan meninggal pada tahun 1162 M. Beliau sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau internis.

3. Ibnu Sina, dilahirkan di Afsara (Asia tengah pada 980 H/1593 M dan meninggal di isfahan pada tahun 1037/1650 M. Bukunya yang sangat terkenal dibidng kedokteran adalah Al Qanun Fi Al Thib, dijadikan buku pedoman kedokteran, baik di Universitas-universitas Eropa maupun Negara Islam.

4. Abu bakar Muhammad Ibnu Zakaria, Ar Arazi

Beliau dilahirkan pada tahun 909 M. Buku karangannya tentang kedokteran dijadikan buku difakultas kedokteran. Bukunya diberi nama Al Hawi (menyeluruh). Ia yang menemukan penyakit cacar, dan membaginya

⁹²Al-Mansuri. *Prinsip-Prinsip Kedokteran Islam*. Jakarta: Pustaka Media H. 5.

menjadi cacar air (variola) dan cacar merah (rovgella), menemukan terapi tekanan darah tinggi atau hipertensi.⁹³

Pola hidup sehat mencakup tata cara seseorang menjalani kehidupan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang telah disyariatkan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam dan telah dicontohkan oleh nabi muhammad SAW, baik cara hidup maupun cara makan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pola hidup sehat yang ada dalam Al-Qura'an dan yang dicontohkan Nabi Muhammad perlu untuk ditiru dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam hidup seseorang menjadi lebih baik dan bermakna serta bermanfaat.⁹⁴

c. Pola Hidup Sehat Rasulullah

Nabi muhamamad Saw, memberikan contoh pada kita yang sangat baik dalam menjalankan pola hidup sehat. Beliau selama hidupnya hampir tidak pernah sakit. Tidak seperti manusia sekarang ini, mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton televisi dan mengkonsumsi makanan yang kurang baik untuk kesehatan, dan dikemudian hari banyak meminum obat-obatan yang sebenarnya kurang baik bagi kesehatan dan malah bisa merusak organ tubuh dan menjadikan sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Saat inilah orang merasa bahwa nikmat dan karunia Allah tentang hidup sehat begitu berarti.⁹⁵

⁹³Nata Abudin. *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*. (Jakarta,Bandung 2004). H. 75.

⁹⁴Ade Hasman. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. (Jakarta: Noura Book. 2012), H. 52.

⁹⁵*Ibid*. H. 55.

Pola hidup juga memberikan pengaruh dalam hidup sehat yang mana hidup seseorang yang perlu dijadwalkan atau diatur sedemikian rupa, dimana saat tubuh perlu istirahat saat kelelahan, dimana sistem tubuh selain bekerja, tubuh juga memerlukan untuk beristirahat.⁹⁶

Tips sehat menganjurkan tidak tidur setelah subuh dan setelah ashar, tetapi tidur sianglah sejenak saja. Rasulullah menganjurkan agar memulai dan mengakhiri tidur dengan berdo'a yakni membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, An-Naas, Al-Falaq dan terakhir Al-Baqarah, sebelum tertidur.⁹⁷

d. Pentingnya Gerak Badan (shalat) Bagi Kesehatan

Kesehatan tidak mungkin diperoleh, kecuali jika kita senantiasa bergerak. Diantara ciri mutlak hidup biologis adalah bergerak. Tidak satu komponen pun dalam tubuh kita yang tidak bergerak. Benda padat seperti tulang pun, ketika diam mengalami dinamisasi internal proses bongkar pasang elemen-elemen seluruhnya, ada pergerakan cairan ekstra dan internal, serta ada juga gerak dalam wujud kontraksi otot, peristaltic, usus gerak metabolisme kimiawi dan gerak quantum elektrik.⁹⁸

e. Kebersihan

Kebersihan jasmani badan dan tempat ibadah merupakan syarat mutlak pertama sekali bagi seorang muslim jika ia hendak melakukan ibadah shalat menghadap Allah Swt.⁹⁹

f. Puasa

⁹⁶Ade Hasman. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. (Jakarta: Noura Book. 2012), H. 57.

⁹⁷*Ibid.* H. 61.

⁹⁸*Ibid.* H. 62.

⁹⁹*Ibid.* H. 68.

Adapun beberapa manfaat puasa bagi kesehatan antara lain: Puasa mempengaruhi kemampuan berkonsentrasi disaluran pencernaan, sehingga otak cukup mendapat sediaan maksimal ketika ia bekerja sehingga kegiatan berfikirnya menjadi optimal.¹⁰⁰ Puasa juga sebagai pengikisan lemak dalam tubuh. Puasa memberikan kesempatan beristirahat sistem saluran cerna. Lambung, saluran cerna usus dan liver sebagai pabrik utama dari proses metabolisme juga akan berkurang bebannya hingga secara tidak langsung organ-organ lain semakin berkurang bebannya.¹⁰¹ Tidak pernah ditemukan orang yang mati atau jatuh sakit berat akibat berpuasa dibulan ramadhan. Bila seseorang benar-benar sakit, sejak awal Allah sudah mengizinkan mereka berpuasa, dan boleh menggantinya dengan membayar fidyah.¹⁰²

B. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Dalam pengertian hukum, hak adalah hak, “kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Secara umum, hak senantiasa bertalian dengan kewajiban. Artinya hak akan lahir ketika suatu kewajiban terpenuhi dan dilindungi oleh hukum.¹⁰³

¹⁰⁰ Ade Hasman. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. (Jakarta: Noura Book. 2012), H. 70.

¹⁰¹ *Ibid.* H. 71.

¹⁰² *Ibid.* H. 72.

¹⁰³ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet I, PT. Presentasi Pustakarya, Jakarta, 2010, HLM. 26.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.

Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf m kewajiban Rumah Sakit terhadap Pasien dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.¹⁰⁴ Oleh karena itu Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki pasien sebagai seorang makhluk Tuhan, terutama dua hak dasar pasien, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar keperawatan.
2. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih Rumah Sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain, hak atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan ataupun pengobatan yang akan

¹⁰⁴Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pasal 2 ayat (1) huruf m.

dilakukan oleh dokter, dan lain-lain, kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, seperti tindakan aborsi tanpa indikasi dan lain sebagainya tidak dapat dibenarkan.

Rumah Sakit harus memberikan penjelasan mengenai apa yang diderita pasien, tindakan apa saja yang hendak dilakukan, dan meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis tertentu.¹⁰⁵

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada pasal 2 ayat (1) bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- f. Melaksanakan fungsi sosial.

¹⁰⁵Pitono Soeparto. *Etik dan Hukum dibidang kesehatan*. (Surabaya: Airlangga University Press: 2006.) H. 39.

- g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
- h. Menyelenggarakan rekam medis.
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia.
- j. Melaksanakan sistem rujukan.
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban.
- m. Menghormati dan melindungi hak pasien.
- n. Melaksanakan etika Rumah Sakit.
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
- p. Melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau ke dokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*).
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan,

- t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.¹⁰⁶

Kewajiban Rumah sakit sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b. Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada Pasien dalam memberikan pelayanan kepada pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik menurut ras, agama, suku, gender kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (*difable*), latar belakang sosial politik dan antar golongan.¹⁰⁷

Dalam pasal 2 ayat (2) Rumah Sakit mempunyai kewajiban mengupayakan Keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus dan Keamanan pasien, pengunjung dan petugas di Rumah Sakit.¹⁰⁸

Kewajiban Pasien dengan adanya penyelenggaraan keadaan yang diadakan Rumah Sakit. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban pasien atas pelayanan yang diterimanya. Kewajiban pasien adalah mengikuti semua prosedur dan peraturan yang ditetapkan di Rumah Sakit.¹⁰⁹

¹⁰⁶Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pasal 2 ayat (1)

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰⁸Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pasal 2 ayat 2.

¹⁰⁹Setya Enti Rikomah. *Farmasi Rumah Sakit*. (Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2017). H. 29.

Kemudian dalam Pasal 26 dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien Mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan,
8. Memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterima.¹¹⁰

Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan yang baik dari beberapa institusi penyelenggara di atas agar kinerjanya dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena

¹¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 26.

adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di butuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis tersebut memenuhi kriteria tersebut sehingga meningkatkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan.

C. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, pengertian Rumah sakit adalah intuisi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹¹¹

Rumah Sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting. Kegiatan utama sebuah rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien. Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang sangat kompleks yang menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan kesehatan melalui pendekatan kesehatan (*promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang agama, golongan dan kedudukan. Untuk melakukan tugas dan fungsinya rumah sakit harus mampu membiayai segala kebutuhan yang diperlukan di Rumah Sakit, sehingga citra Rumah Sakit bergeser dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomis.¹¹²

¹¹¹Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 1 ayat (1).

¹¹²Setya Enti Rikomah. *Farmasi Rumah Sakit*. (Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2017). H. 2.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan baik itu dirumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktek pribadi, antara lain:

a. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹¹³ Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan termasuk didalamnya tentang persamaan hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.¹¹⁴ Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dipahami dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban.

b. Perawat

Perawat adalah profesi yang bersifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling mempegaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-

¹¹³Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 1 Ayat (11)

¹¹⁴Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). H. 3.

tiap individu yang berangkutan.¹¹⁵ Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.¹¹⁶ Sebagai suatu profesi perawat mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan bagi perawat untuk terus menerus memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perbuatan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷ Pada proses hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien mempercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan

c. Bidan

¹¹⁵Mimin Emi, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), H. 4.

¹¹⁶Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. H. 25.

¹¹⁷Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perbuatan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1).

Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia. Definisi bidan menurut Internasional Confederation of Midwife (ICM) Tahun 1972 adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberikan izin untuk menjalankan praktik kebidanan dinegeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervise, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak.¹¹⁸

Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksi kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak ada tenaga medis lain. Definisi bidan di Indonesia adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan memperoleh izin.¹¹⁹

Secara otentik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No.HK. 02.02/MEMKES/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan menjelaskan yang dimaksud dengan bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁰ Bidan mempunyai tugas

¹¹⁸Atik Purwandi, *Konsep Kebidanan Sejarah & Professionalisme*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2008), h. 5.

¹¹⁹Atik Purwandi, *Konsep Kebidanan Sejarah & Professionalisme*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2008), h. 6.

¹²⁰Peraturan Menteri Kesehatan No.HK. 02.02/MEMKES/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan.Pasal 1 Ayat (1).

penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita sebagai pasiennya tetapi termasuk komunitasnya.

d. Apoteker

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (5) apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.¹²¹ Adapun tugas yang dimiliki oleh seseorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan farmasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
- 2) Membuat dan memperbaharui SOP (*Standar Operasional Procedure*) baik di industri farmasi.
- 3) Memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh menteri, saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, termasuk pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi.
- 4) Sebagai penanggung jawab di *industry* farmasi pada bagian farmasi mutu (*quality Assurance*), produksi, dan pengawasan mutu.

¹²¹Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (5).

- 5) Sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di apotek, di instansi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
- 6) Melakukan pelayanan kefarmasian diapotik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 7) Menjaga kerahasiaan kefarmasian di industri farmasi dan di apotek yang menyangkut proses produksi, distribusi dan pelayanan dari sediaan farmasi termasuk rahasia pasien.

Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan kesehatan yang baik dari beberapa instansi penyelenggara diatas agar kinerjanya dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis tersebut memenuhi kriteria tersebut sehingga meningkatkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan dewasa ini.

1. Rumah Sakit di dalam Islam

Rumah sakit pada masa Rasulullah berwujud klinik berjalan yang selalu mendampingi pasukan Rasul. Pasukan unta biasanya yang kebagian tugas yang menjadi posko klinik darurat ini. Tradisi ini masih di teruskan oleh pasukan *ghasnabiyah* dipimpin sultan mahmud, tetapi dengan dukungan karavan medis khusus berkekuatan 40 unta.

Pada masa kekhilafan Islam, di baghdad telah terdapat rumah sakit yang cukup mewah, bersih dan teratur perawatannya. Sementara itu bangsa romawi masih mempercayai dukun-dukun, penyakit sampai diobati dengan jampi dukun lalu diludahi matanya, penyakit-penyakit yang dianggap ajaib masih dihubungkan dengan pengaruh hantu-hantu yang suka menjelma menjadi kelelawar atau serigala di waktu malam.

Rumah sakit di dunia Islam pertama kali didirikan pada zaman Dinasti Umayyah oleh seorang khalifah al- Walid pada 87 H/706 M. Di rumah sakit ini dipekerjakan para pelayan dan pembimbing untuk membantu para penghuninya.¹²²

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati berkaitan dengan rumah sakit di zaman Islam, yaitu : *pertama*, petugas medis atau dokter bukan hanya orang Islam, melainkan juga orang-orang yang beragama diluar Islam, terutama penganut Kristen Nestorian, contohnya rumah sakit. Harun al-Rasyid di pimpin oleh seorang Kristen Persia bernama Yuhana Ibn Masa-Waih. *Kedua*, buku-buku tentang kesehatan yang bersumber dari yunani dan bahasa sanskerta banyak diterjemahkan ke dalam bahasa arab. Hal ini terutama pada zaman khalifah al- Makmun. *Ketiga*, banyak rumah sakit diletakan dekat denga masjid jami'. (tempat-tempat publik) dimana banyak orang yang berkumpul. *Keempat*, rumah sakit bukan hanya dijadikan lahan tempat pengobatan, belajar para calon tenaga medis, tetapi juga dijadikan tempat

¹²²Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. *Konseling Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2017).
H. 132

belajar para calon tenaga medis. *Kelima*, sumber pembiayaan rumah sakit banyak diambil dari zakat dan wakaf.¹²³

Keenam, pembimbing rohani belum menjadi tenaga khusus karena aktivitas- aktivitas keagamaan begitu mewarnai rumah sakit. Dokter-dokter atau karyawan-karyawan bukan hanya memberikan pelayanan dibidang medis, melainkan juga memberikan dorongan spiritual kepada seluruh pasien.

Belajar dari pengalaman sejarah di rumah sakit yang ada didunia Islam menunjukkan, bahwa keberadaan pasien berikut haknya sangat diperhatikan oleh para pengelola dan tenaga medis di rumah sakit. Mereka bukan hanya mendapatkan perawatan secara medis, melainkan juga mendapat sentuhan dari sisi psikologis dan spiritual.¹²⁴

2. Hak Dan Kewajiban Pasien Di Rumah Sakit

Ketika masuk rumah sakit, pasien dan keluarga biasanya berada dalam posisi yang lemah tak berdaya. Pihak keluarga pasien atau orang yang membawa ke rumah sakit begitu cemas, khawatir, dan pikiran yang tidak tenang. Dibenak mereka, pasien harus segera ditolong, masalah lainnya tidak di pikirkan terlebih dahulu oleh mereka. Dalam kebingungan harus bagaimana bersikap, kepada siapa harus bertanya, seperti apa prosedurnya, maka pasien dan keluarga biasanya mengikuti saja apa yang dikatakan petugas yang ada dirumah sakit.

Persoalan yang sering muncul pada saat orang hendak berobat kerumah sakit adalah lambatnya penanganan yang diberikan oleh pihak rumah sakit,

¹²³Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. *Konseling Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2017). H. 133.

¹²⁴Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. *Konseling Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2017). H. 134.

dengan berbagai *reasoning* yang dibuatnya. Bahkan dengan berbagai pertimbangan, seperti faktor keuangan, banyak rumah sakit yang berlatar belakang miskin. Padahal dalam keputusan menteri kesehatan RI Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Di Daerah dinyatakan bahwa rumah sakit kabupaten/kota dalam menyelenggarakan fungsinya diharapkan dapat menjalankan pelayanan terjangkau dan merata, serta mengutamakan kepedulian kepada masyarakat yang tidak mampu.

Untuk menghindari hal tersebut, pihak rumah sakit atau lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kesehatan seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi tentang hak-hak pasien dan kewajibannya yang harus diikuti di rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak semauanya menolak pasien yang hendak berobat atau sebaliknya, pasien dengan seenaknya meninggalkan rumah sakit tanpa melakukan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Seperti halnya hubungan kerja atau kerjasama dua belah pihak, setiap pihak mempunyai hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan.¹²⁵

Kewajiban-kewajiban pasien diuraikan sebagai berikut :

1. Pasien dan keluarganya harus menaati segala peraturan yang berlaku di Rumah Sakit tersebut.
2. Pasien harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang semua penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.
3. Pasien wajib mematuhi segala instruksi dokter dan perawat yang ada di Rumah Sakit tersebut.

¹²⁵Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. *Konseling Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group: 2017). H.135.

4. Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi perjanjian yang telah ada ditanda tangani oleh pasien.
5. Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh Rumah Sakit/Dokter.¹²⁶

3. Hak dan kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

Rumah sakit dimata hukum juga merupakan badan hukum (*rechpersoon*), rumah sakit berhubungan dengan pasien dan masyarakat. Rumah Sakit juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang ada di dirinya. Adapun, hak rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Rumah Sakit dapat membuat peraturan Rumah Sakitnya sendiri, yang dimaksudkan dengan membuat peraturan Rumah Sakit adalah peraturan-peraturan khusus yang diberlakukan dalam Rumah Sakit tersebut, seperti halnya dengan peraturan jam besuk, menggunakan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan lain-lain sebagainya.
- b. Mensyaratkan pasien harus menaati segala peraturan Rumah Sakit baik itu dalam pengobatan maupun saat berada dalam Rumah Sakit.
- c. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
- d. Memilih serta menyeleksi tenaga dokter yang akan dipekerjakan pada Rumah Sakit tersebut, hal ini berhubungan dengan persoalan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap personalia sehubungan dengan doktrin Hubungan Majikan Karyawan.

¹²⁶Saputra, Bagus Wira. Juni 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan pasien”. E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/>.

- e. Menuntut pihak-pihak yang melakukan wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pasien maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit tersebut.

4. Tanggung Jawab Rumah Sakit Kepada Pasien

Dalam hal pelayanan Rumah Sakit, perawatan dan pengobatan terhadap pasien yang terjadi di dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab penuh adalah Rumah sakit itu sendiri. Pengertian yang diterangkan sering juga disebut dengan *Doktrin Corporate Liability*. Secara tegas tanggung jawab Rumah Sakit tersebut dan Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien dengan alasan apapun, yang diutamakan adalah keselamatan pasien.¹²⁷

5. Etika Pengobatan

Etika menurut Ar-Razi dalam kitabnya *Ash-Shirath Falasifah* dan *Athibb Ar-Ruhani*. Menggambarkan etika pengobatan. Etika Pengobatan menurutnya menjadi sangat penting karena:

Pertama, menyangkut tanggung jawab etika seorang dokter dengan pasien yang memiliki 2 (dua) dimensi dalam islam, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan antara dokter dengan pasien, antara lain berkaitan dengan keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesionalisme yang diperlihatkan kepada pasien.

¹²⁷Saputra, Bagus Wira. Juni 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan pasien”. E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/>.

2. Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan bermoral, maka pengobatan tidak akan berjalan dengan efektif (dengan mengabaikan pertimbangan bahwa dokter yang tidak etis tentu saja akan bereputasi buruk sehingga tidak akan berhasil).¹²⁸

Kedua, dalam etika Islam kesehatan merupakan sebuah unsur kesehatan yang utuh, artinya jika orang tidak bermoral yang baik, positif dan seimbang ia juga tidak akan bisa merawat kesehatan secara utuh, jadi dari perspektif ini, baik kesehatan moral maupun kesehatan fisik menjadi perhatian media secara langsung.

Menurut Ar-Ruhawi, seorang dokter harus memiliki etika sebagai berikut:

- a. Wajib menghubungkan kesehatan spiritual dan kesehatan jasmani. Dalam hal ini, ia tampaknya sependapat dengan Hipocrates, bahwa seorang calon dokter sebaiknya menjalani dengan baik dari segi jasmani maupun kejiwaan. Karena itu, rutinitas keseharian seseorang dokter digambarkannya sebagai berikut: Ia harus senantiasa menuci mulutnya, membersihkan dan menggosok giginya, memeriksa bagian-bagian dari organ-organ tubuhnya. Pakaian yang dikenakan harus menunjang profesinya dan harus menarik. Selanjutnya, ia berdoa dan membaca buku-buku (bimbingan agama) dan kitab-kitab/buku pengobatan.
- b. Senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang berbudi luhur dan terpelajar.

¹²⁸ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H. 309.

- c. Tidak membeli tanah dan membuat bangunan sendiri, atau aktif berdagang, karena menghalangi untuk mencari ilmu dalam rangka meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang dokter.
- d. Memperoleh pendapatannya yang layak untuk meringankan kebutuhannya, untuk membesarkan dan mendidik anak-anak dibidang praktik pengobatan, serta untuk memelihara perkawinan dan kenyamanan hidup berkeluarga.¹²⁹

Abu bakar Ar-Razi, juga menganjurkan kepada pasien dan dokter, agar masing-masing mematuhi etika. Menurut etika yang harus dipatuhi oleh pasien antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti dengan ketat perintah dokter.
2. Menghormati dokter dan harus menganggap dokter sebagai sahabat terbaiknya.
3. Berhubungan langsung dengan dokter dan tidak boleh merahasiakan penyakit yang dideritanya.
4. Meminta nasihat/konsultasi dengan dokter cara menjaga kesehatan.

Sedangkan terhadap para dokter, Ar-Razi menasihatkan etika yang seharusnya menjadi panduan dalam melaksanakan tugasnya, anatara lain sebagai berikut:

- a) Berbudi luhur
- b) Dapat dipercaya oleh pasien
- c) Memupuk keyakinan profesional

¹²⁹ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H.310.

- d) Seorang dokter harus sabar, sopan, dan berbelas kasih kepada semua pasien Seorang dokter harus mencoba bersikap mandiri dan orisinal, untuk melakukan diagnosis dan terapi
- e) Tidak membedakan antara pasien yang kaya dan yang miskin
- f) Hidup seimbang, tidak berlebih-lebihan
- g) Tidak membuang-buang waktu serta energi dengan menikmati kesenangan dan kenikmatan, bahkan sebagian waktunya harus dicurahkan untuk pasien
- h) Merasa bangga dengan profesinya, karena semua agama menghormati profesi dokter
- i) Harus mampu membuat pasiennya senang dan gembira.¹³⁰

1. Hak Dan Kewajiban Petugas Kesehatan

a. Kewajiban-kewajiban petugas kesehatan

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan.
2. Memberikan pelayanan yang baik (teliti, ramah, komunikatif dan tidak diskriminatif) terhadap pasien.
3. Menetapkan tarif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Mengusahakan keringanan biaya dapat perawatan dan pengobatan bagi pasien yang kurang mampu.
5. Bertanggung jawab atas kematian/penderitaan, atau kerugian pasien yang benar-benar disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
6. Melindungi pasien dari sasaran propaganda agama lain.

¹³⁰ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H.311.

7. Menyampaikan amanat/wasiat pasien yang meninggal kepada keluarga ahli warisnya yang tidak sempat mendampingi saat wafatnya.
8. Membantu mengusahakan pemakaman jenazah secepatnya mungkin, baik, yang tidak diketahui identitasnya, maupun yang diurus oleh keluarganya.
9. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya abortus, menstruasi regulation (penghentian kehamilan), euthanasia (suntik mati), baik dengan jalan memberi obat suntuk atau minuman yang dapat mempercepat kematian pasien, atau dengan cara tidak memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk kesehatan pasien, sekalipun atas desakan pasien sendiri.¹³¹

2. Hak-Hak Petugas Kesehatan

- a. Mendapat imbalan berupa gaji, honor, dan lain-lain yang layak sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- b. Mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintahan dan masyarakat atas dedikasi dan penemuan ilmiah dalam bidang kesehatan/dokter.
- c. Mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya.
- d. Melindungi pasien dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwanya dan akidah/agamanya
- e. Menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.¹³²

3. Hak dan kewajiban pasien.

¹³¹ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H.312.

¹³² Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H. 313.

1. Membayar biaya konsultasi, pengobatan, perawatan sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.
 2. Mempercayai dan mematuhi semua perintah, nasihat, dan peraturan yang diberikan oleh petugas kesehatan, selama tidak bertentangan dengan ajaran islam.
 3. Menerangkan dengan sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dideritanya.
4. Hak-hak pasien.
1. Mendapatkan pelayanan yang baik/manusiawi dari petugas kesehatan.
 2. Mendapatkan perlindungan dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwa dan akidah/agamanya.
 3. Menurut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpanya apabila terjadinya musibah itu karena kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
 4. Menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran islam.¹³³

¹³³ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010). H. 314.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abudin, Nata *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*. Jakarta: Binarupa Aksara. 2004.

Al-Mansuri. *Prinsip-Prinsip Kedokteran Islam*. Jakarta: Pustaka Media.

Al-zuhayli, Wabih . *Ushul al-Fiqh al-islami*. Damaskus: Daral-Fikr. 2010.

Al-Hafidz. Ahsin W. *Fiqh Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2010).

Arkunto, Suharmisi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Azwar, Azrul. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara. 2011

Ms, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Basit, M. Ag, Dr. H Abdul. *Konseling Islam*. Jakarta: Prenada Media Group: 2017.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana. 2007.

Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta Kencana, 2003)

Emi, Mimin, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004).

Enti Rikomah, Setya. *Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2017.

Hasman, Ade. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. (Jakarta: Noura Book. 2012).

Hadi Parnomo, Wahyono. Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. Yogyakarta: Deepublish. Grup penerbit Cv Budi Utama. 2017.

HD, Kelani. *Islam dan Aspek-Aspek kemasyarakatan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

- Ibrahim, Reni. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Ibrahim, Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta Kalam Mulia, 2003).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Pratama. 2017.
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Jallaludin, Abdurahman, As-Suyut. *Pengobatan cara nabi*. 2006. Pustaka Hidayah. Bandung.
- J Suyuti, Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali. 2012.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana Aksara. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Departemen Pendidikan. 2011.
- Kartono, Kartini *pengantar metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Muin Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti. 2004.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor:Ghala Indonesia. 2009.
- Ohoiwatun,Y.A Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Banyu Media, Malang. 2007.
- Purwandi, Atik. *Konsep Kebidanan Sejarah & Professionalisme*. (Jakarta: Kedokteran EGC, 2008).
- Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Salim Munir, Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016.

Soeparto, Pitono. *Etik dan Hukum dibidang kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press: 2006.

Susdiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Peneliti dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung. 2015.

Suntana, Ija. *pemikiran ketatanegaraan Islam*. bandung: Pustaka Setia. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. Undang-undang. 2018.

Syarif, Muzar Ibnu dan Zhada, Khamami, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).

Tanzah, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009.

Triwulan, Titik dan Febriana, Sinta. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet I, PT. Presentasi Pustakarya. Jakarta. 2010.

W. Al-Hafidz, Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2017.

B. Jurnal.

Bagus Wira, Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan pasien, E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juni 2015, <http://e-journal.uajy.ac.id/>.

Rodiah Nur, Efa, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan, ejournal.undip.ac.id, Jilid 45 No. 2, April 2016. <https://ejournal.undip.ac.id/>.

C. Al-Qur'an

Al Maidah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya. Haalim Publishing dan Distributing. 2014.

D. Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 1 Ayat (11).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perbuatan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (5).

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Ali Satrio.Spb, Dokter Di Ruang Poli Bedah, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, 13 Februari 2021.

Hasil wawancara Ns. Andriyanto, S.Kep.Dokter Anak, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 13 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Rizky Pratama, Petugas Di Ruang Anak Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 15 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ns. Endriyana. S.Kep di Ruang Anak, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 15 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan bapak M. Syukur, Sebagai Pasien Rawat jalan Rumah Sakit Daerah Pringsewu 16 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Heru Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, 16 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Supinah Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti Sebagai Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ria Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah Pringsewu, 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Feri Sujatmiko Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sakimin, Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Etik, Sebagai Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Siti Marliyah Sebagai Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 17 Februari 2021.

